

## **Peran Pekerja Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Candirejo Semarang**

**Kuni Farikhah<sup>1</sup>**

UIN Salatiga

<sup>1</sup>[kunifarikhah712@gmail.com](mailto:kunifarikhah712@gmail.com)

**Novie Purnia Putri<sup>2</sup>**

UIN Salatiga

<sup>2</sup>[purniaputri@uinsalatiga.ac.id](mailto:purniaputri@uinsalatiga.ac.id)

**Raka Galih Sajiwo<sup>3</sup>**

Universitas Terbuka

<sup>3</sup>[rakagalihsajiwo@gmail.com](mailto:rakagalihsajiwo@gmail.com)

### **Abstract**

*Poverty is a complex problem in Indonesia, so the Family Hope Program (PKH) has been introduced which focuses on improving family welfare. This research aims to describe the role of social workers as PKH assistants in handling poverty and the factors that become obstacles to this assistance. The research location was carried out in Candirejo Village, Tuntang District, Semarang Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The PKH assistants and the PKH beneficiary family community are the research subjects. Observation, interviews and documentation are data collection techniques. The research results show that PKH facilitators have roles as providers of facilities, educators and as community representatives. There are factors that hinder PKH facilitators in carrying out mentoring activities, both internal and external factors.*

**Kata kunci:** Social Worker; PKH; Poverty Alleviation,

### **Abstrak**

Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia sehingga dihadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran pekerja sosial sebagai pendamping PKH dalam penanganan kemiskinan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pendampingan tersebut. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pendamping PKH dan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat PKH

sebagai subjek penelitiannya. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH memiliki peran sebagai pemberi fasilitas, pendidik dan sebagai perwakilan masyarakat. Terdapat faktor yang menjadi penghambat pendamping PKH dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, baik faktor internal maupun eksternal.

**Kata Kunci:** Pekerja Sosial; PKH; Penanggulangan Kemiskinan

## **Pendahuluan**

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial masyarakat dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Unsur pelaksana ini memiliki wewenang tersendiri dalam menangani berbagai bidang sosial yang salah satunya yaitu menangani masalah kemiskinan di suatu masyarakat (Anwar et al., 2020). Dalam suatu daerah tentu terdapat dinas sosial yang menangani permasalahan-permasalahan penduduk warga sekitarnya.

Dinas sosial ini terletak di daerah Kabupaten/Kota di suatu daerah. Di setiap masing-masing daerah tentunya Dinas Sosial memiliki sebuah program, salah satunya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) yang mana program ini dibentuk oleh Kementerian Sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Dimana Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas (Abdul Muin & Lubis, 2020). Adanya program PKH ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu penyakit sosial di tengah masyarakat.

Kemiskinan menjadi permasalahan utama dan sering terjadi di negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan dari semua pihak secara bersama dan kerja keras yang terorganisir untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Kemiskinan dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan kemiskinan dapat terjadi karena faktor internal, diantaranya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-haridan tidak mampu dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Selain itu ada juga faktor eksternal yang menimbulkan

kemiskinan, diantaranya adalah kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan (Nafi, 2021).

Kemiskinan menjadikan generasi bangsa tidak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, keterbatasan akses kesehatan, minimnya tabungan dan tidak adanya investasi, kesulitan akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, keterbatasan jaminan social perlindungan terhadap keluarga, menguatkan arus urbanisasi dan yang lebih memprihatinkan kemiskinan menyebabkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan menjadi terbatas (Ad Steer: 2011).

Kemiskinan juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, diantaranya akan melemahkan moral dan etika. Kemiskinan juga dapat menimbulkan pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), kerusakan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa (Bolung, 2022).

Masalah kemiskinan ini yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya produktifitas akan mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah (Supriyanto, 2006).

Penduduk miskin akan bertambah seiring berjalannya waktu dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok karena kenaikan harga BBM. Terutama penduduk fakir miskin, jika diberikan bantuan berupa subsidi saja tidak akan mencukupinya dan tidak dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah untuk segera membuka akses faktor produksi bagi masyarakat miskin (Supriyanto, 2006).

Data Kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebesar 7,27 persen dan berada pada posisi ke-6 Kabupaten/kota dengan presentase penduduk miskin terkecil. Kemudian pada bulan maret 2023, jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Semarang mencapai 78,35 ribu jiwa (7,17 persen), berkurang sebanyak 0,25 ribu jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2022.

Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagaimana dinas sosial di daerah lainnya memiliki program PKH, terutama di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Pelaksanaan PKH ini terdapat Pekerja Sosial yang bertugas dalam mendampingi masyarakat penerima PKH. Pekerja sosial sendiri merupakan profesi pertolongan yang membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. (Pujileksono, 2018)

Pekerja Sosial melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (R. Indonesia, n.d.)

Terdapat dalil dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, "Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat- ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Departemen Agama, n.d.) Dalam ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa kunci kesuksesan dalam menggapai kehidupan di dunia adalah iman dan taqwa. Untuk itu pendekatan seorang pekerja sosial dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya dalam bidang ekonomi maka harus dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selaras penelitian yang dilakukan oleh Siti Abidah Lubis tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang menunjukkan peran dinas terhadap upaya penanganan kemiskinan melalui PKH serta pemberdayaan masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Selain itu terdapat penelitian lain oleh Evi Rahmawati dengan bahasan yang sama yakni Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus terkait dengan peran Pekerja Sosial dalam program PKH dan implementasinya di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang (Siti Abidah Lubis, 2019).

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dan implementasi Pekerja Sosial serta hambatanya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten

Semarang. Harapannya melalui tulisan ini dapat menjadi bahan literatur terkait dinamika peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan khususnya Desa Candirejo Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017: 6).

Menurut Andi Prastowo (2011: 181) pendekatan penelitian merupakan cara mendekati objek penelitian. Pendekatan mengandalkan penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang dan menggunakan pendekatan deskriptif.

Subjek penelitian ini terdiri pekerja sosial rehabilitasi sosial, yaitu pendamping PKH, yang mengatur jalannya PKH di Desa Candirejo. Adapun subjek dari penelitian ini adalah penerima manfaat bantuan PKH yang ada di Desa Candirejo. Terdapat 2 informan yang penulis wawancara. Dari penerima manfaat didapatkan informasi pelengkap sebagai pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Sehingga akan didapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan lebih jelas lagi.

Observasi atau pengamatan adalah merupakan dasar semua ilmu pengetahuan observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu, atau menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan yang canggih. Observasi yang menulis maksudkan disini adalah untuk mengumpulkan data yang di perlukan, penelitian mengadakan observasi secara langsung di lapangan (Yusuf, 2017). Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dengan memilah dokumen-dokumen yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dimulai dari menghilangkan data yang tidak perlu setelah melakukan wawancara. Data yang telah direduksi kemudian dibuat narasi deskriptif

sebagai penyajian data dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti melakukan triangulasi agar data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran Pekerja Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH**

Pekerja sosial sebagai pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep peran pekerja sosial merupakan peran dan keterampilan memfasilitasi yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. (Habibullah, 2011)

Senada dengan penjabaran di atas, pekerja sosial memiliki tugas sebagai berikut (Barker, 2003) pertama, menolong orang untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan mereka untuk *problem solving and coping*. Kedua, menolong mereka memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga, memfasilitasi interaksi antar individu dan antara individu dengan lingkungannya. Keempat, mendirikan lembaga/institusi untuk merespons permasalahan/kebutuhan orang. Kelima, mempengaruhi kebijakan sosial. Hal lainnya yang dilakukan seorang pekerja sosial adalah pemberi nasehat agar masyarakat mampu membangun kehidupannya, selayaknya manusia lain pada umumnya. Adapun kerja pendamping PKH adalah individu-individu yang mengarahkan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat secara bersama agar permasalahan dapat terpecahkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial yang berperan sebagai pendamping PKH di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yaitu melakukan mediasi dan negosiasi, memberikan dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Kesemua itu dilakukan agar masyarakat mampu berpartisipasi untuk melakukan tindakan bersama dalam pemanfaatan potensi yang ada di Desa Candirejo.

Pendamping memberikan kemudahan berbagai fasilitas yang dibutuhkan klien atau penerima bantuan sehingga dapat memecahkan masalah serta mendorong kemampuan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga akan menciptakan kemandirian klien (D. S. R. Indonesia, 2009). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan pendamping PKH (tidak disebut namanya) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa penerima manfaat atau klien yang mengalami permasalahan dan mengharuskan pendamping PKH membantu mengatasi permasalahan tersebut, terutama klien yang sudah tergolong rentan.

Dalam literatur pekerjaan sosial, dapat berperan sebagai fasilitator yang sering disebut sebagai pemungkin, bahkan keduanya sering diperdebatkan. Seperti yang dinyatakan Barker (1987) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987).

Pekerja sosial sebagai pendamping PKH juga dapat berperan sebagai animator yang bertugas memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada keluarga penerima manfaat PKH, dan itu pun dilakukan ketika penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban PKH (Rahmawati, 2017). Salah satu kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah KPM harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan yang didampingi seorang pendamping PKH.

Misalnya kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita serta anak pra sekolah. Menurut informan Ibu Erna (19-11-2022) pendamping PKH berperan sebagai animator dalam melakukan pendampingan KPM untuk memberikan kemudahan dalam proses fasilitasi, kebutuhan dan penyelesaian masalah yang dialami penerima bantuan.

Visi pekerjaan sosial adalah “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994). Selain itu, pendamping juga memberikan gagasan atau masukan positif serta pelatihan kepada KPM PKH untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara efektif. (Damanik et al., 2008)

Dalam upaya peningkatan ketrampilan terhadap KPM PKH, pekerja sosial juga memberikan sosialisasi atau edukasi terkait pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa yang akan datang. Dari sinilah pendamping berperansebagai pendidik yang menyampaikan materi edukasi, pendidikan dan pengasuhan anak, ekonomi, kesehatan serta perlindungan anak, lansia, dan disabilitas. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan pendamping PKH tentang waktu sosialisasi kepada penerima bantuan PKH ketika diadakan di rumah penerima manfaat, secara bergilir sekaligus memberikan materi yang sesuai dengan kondisi klien.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Pekerja sosial yang berperan menjadi pendamping PKH juga ikut serta dalam perwakilan masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan interaksi antar pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pendamping PKH dapat mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerjamengunjungi penyedia layanan, seperti mengunjungi layanan kesehatan berupa puskesmas dan posyandu.

Pendamping PKH mengunjungi layanan pendidikan berupa tempat anak-anak KPM PKH bersekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu program. Selain itu pendamping juga harus memantau



kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada sehingga dapat mencegah kegagalan program.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran Pekerja sosial khususnya sebagai pendamping PKH relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife yang mengacu pada peran pekerja sosial (pendamping) umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu : fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Pendamping PKH yang berperan sebagai pekerja sosial di Desa Candirejo telah menjalankan tugas sesuai tugas dan wewenang sebagai pekerja sosial.

Pekerja sosial mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subjek dari seluruh proses dan aktifitas kehidupannya. Selain itu manusia juga mempunyai kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Manusia juga memiliki bahkan bisa menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Memang secara ideal hubungan antara pekerja sosial sebagai pendamping dan masyarakat di dalam program PKH, adalah inisiator yang datang dari atas (pemerintah itu sendiri) atas dasar tanggung jawab bersama dalam melakukan mensejahterakan seluruh komponen masyarakat yang tidak hanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia inisiator itu banyak datang dari pendamping dari luar komunitas (outsider) dan jarang datang dari anggota komunitas itu sendiri.

Mayoritas pekerja sosial di suatu daerah belum tentu berasal dari daerah itu sendiri. Sehingga banyak pekerja sosial yang hidupnya nomaden sesuai sedang ditugaskan di lokasi tertentu. Kecuali komunitas yang wilayah hidupnya terjadi suatu kasus atau masalah yang sifatnya terlihat dan structural. Misalnya, penggusuran tanah, PHK buruh, Intimidasi massal, biasanya komunitas tersebut meminta fasilitasi dan advokasi pada pihak Perguruan Tinggi, Aktivistis Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat atas dasar kebutuhan Bersama yang dirasa serta menimpa seluruh anggota komunitas.

Pekerja sosial merupakan profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerja sosial berpijak pada nilai,

pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (Alamin, 2010).

Tujuan utama pemberian bantuan PKH yaitu supaya anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pertumbuhan sejak janin, balita sampai bersekolah. Sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan mendekatkan kases pelayanan kesehatan dan Pendidikan. Dengan demikian, konsep keberfungsian sosial harus dikedepankan sebagai solusi agar persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi. Hingga pada intinya menunjuk pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungan sekitarnya.

Senada dengan penjelasan di atas, peran pekerja sosial sebagai koordinator yang bertugas menyatukan beberapa jenis komponen secara terorganisir. Misalnya, untuk keluarga dengan banyak masalah seringkali diperlukan beberapa agen untuk bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah keuangan, emosional, hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan interaksi anggota keluarga.

Seseorang di sebuah lembaga perlu mengambil peran sebagai manajer kasus untuk mengoordinasikan layanan dari berbagai lembaga untuk menghindari duplikasi dan untuk mencegah layanan yang beragam dari memiliki tujuan yang saling bertentangan (Zastrow, 2007). Sehingga pentingnya peranan Pemerintah Daerah yang menjadi ukuran keberhasilan Program PKH. Sulitnya berkoordinasi dan respon dan instansi terkait sangat lambat dan mengabaikan yang menjadi kendala bagi pekerja sosial atau pendamping dapat diminimalisir.

### **Hambatan Pendamping PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Segala sesuatu yang menghambat komunikasi disebut noise. Kata ini di ambil dari istilah kelistrikan yang diartikan sebagai sebuah keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak lancarnya atau berkurangnya ketepatan peraturan. Pencetakan huruf yang saling bertindihan dalam suatu surat kabar atau majalah akan menjadi gangguan bagi pembacanya. Kata-kata yang diucapkan secara tidak tepat oleh seorang penyiar akan mengganggu komunikasi dengan pendengarnya. Penggunaan kata-kata asing yang sulit dimengerti tentu merupakan bagian dari noise atau gangguan yang harus dihindari oleh stasiun radio (Nurdianti, 2014).

Gangguan-gangguan komunikasi dapat muncul dengan sendirinya, setidaknya ada beberapa hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan.

Selanjutnya hambatan kerangka berpikir, rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Hambatan semantik dan psikologis, gangguan sematik adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan.

Pelaksanaan pendampingan di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang menemui beberapa kendala. Kegiatan pendamping sosial didominasi oleh proses komunikasi sehingga potensi terjadinya hambatan komunikasi sangat tinggi. Hambatan komunikasi dalam proses pendampingan sosial dapat berasal dari pendamping maupun penerima manfaat.

Pada sisi pendamping dapat terjadi hambatan komunikasi karena minimnya pemahaman pendamping terhadap fokus kegiatan, rendahnya kemampuan pendamping untuk mengkomunikasikan program ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh penerima manfaat, terbatasnya media yang dapat digunakan dalam proses pendampingan sosial (Wijayaptri, 2015). Sedangkan pada sisi penerima manfaat hambatan komunikasi dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman antar penerima manfaat, rendahnya kesadaran penerima manfaat terhadap urgensi kegiatan pendampingan (Luthfyah, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan, ditemukannya faktor penghambat atau kendala yang dialami oleh pekerja sosial dalam pendamping PKH menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala dalam pendampingan antara lain:

Pertama, sulitnya KPM PKH dalam mengumpulkan berkas atau syarat administrasi atau formulir pemutakhiran. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh penerima bantuan PKH bernama Ibu Murtini (19-11-2022) menyampaikan bahwa syarat-syarat berkas pengajuan PKH yang pernah

diajukan namun belum memperoleh bantuan.

Kedua, terdapat penerima manfaat yang belum terdata dalam DTKS. Sesuai dengan yang disampaikan Departemen Sosial (2009) bahwa pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Ketiga, pendamping membutuhkan waktu agar beradaptasi dengan lingkungan baru, karena pendamping PKH hidup secara berpindah-pindah atau nomaden sesuai dengan tugas yang diberikan dari dinas sosial. Pendamping harus selalu siap ketika menghadapi persoalan-persoalan yang baru, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki persoalan dan karakter yang berbeda-beda.

Faktor eksternal yang menjadi kendala yaitu pemberian informasi dari pusat yang sifatnya mendadak sehingga menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Selain itu, jarak yang ditempuh dari pendamping ke wilayah pendampingan cukup jauh, sehingga menyebabkan tertundanya pendampingan, yang menyulitkan pendamping mencari tempat pendampingan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan keberhasilannya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang menyertainya. Faktor pendukung dalam proses pendampingan mencakup tingkat antusias keikutsertaan penerima bantuan PKH. Penerima PKH selalu aktif dalam mengikuti setiap pembimbingan serta penerima bantuan yang rajin hadir dalam pendampingan.

Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih dan mau berkorban demi masyarakat atas dasar ikhlas yang siap menghadapi situasi kondisi lingkungan serta pendekatan lebih intensif. Maka akan memberikan motivasi terhadap terhadap masyarakat miskin, sehingga dalam jangka Panjang akan membawa dampak bagi generasi selanjutnya.

## **Kesimpulan**

Peran pendamping PKH yang ada di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang telah melakukan perannya dengan baik. Baik

peran sebagai pemberi fasilitas, peran pemberi pendidikan atau edukasi, maupun peran dalam perwakilan masyarakat. Sehingga kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat dapat terselesaikan dengan semestinya.

Terdapat faktor yang menjadi penghambat pendamping PKH saat melakukan kegiatan pendampingan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang menonjol yaitu sulitnya penerima manfaat dalam mengumpulkan formulir dan masih terdapat masyarakat yang layak mendapatkan bantuan akan tetapi, mereka belum terdaftar dalam DTKS Sedangkan faktor eksternal yang paling menonjol yaitu pemberian informasi kepada pendamping PKH yang mendadak sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang maksimal.

Peran pendamping sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Setidaknya jumlah pendamping agar lebih ditambah sesuai dengan penempatan yang dekat dengan domisili pendampingan, agar pendampingan lebih efektif tidak terkendala oleh jauhnya tempat pendampingan. Selanjutnya pemerintah dapat lebih memperhatikan dan melakukan pembaharuan data DTKS agar KPM PKH dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan program PKH.

## Daftar Pustaka

- Abdul Muin, M. iqbal, & Lubis, S. A. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528>
- Alamin. 2010. Analisis Peran Pendamping Dalam Program PKH Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Skripsi.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( Bpnt ) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 1–7.
- Barker, R. (2003). *Social Work Dictionary*. US: NASW Press.)
- Bolung, D. S. (2022). Analisis Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan pada Masa Pandemi. *Jurnal Equilibrium*, 3, 64–72. <http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3490>

%0Ahttps://ejurnal.unima.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/3490/2317

- Damanik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, & Nasional, D. J. M. P. D. dan M. D. P. (2008). *Pekerjaan sosial*. Departemen Agama, R. (n.d.). *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Sosial. (2009). Bimbingan teknis PKH. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Habibullah. (2011). Peran pendamping pada program keluarga harapan kabupaten karawang. *Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial)*, 101–116.
- Indonesia, D. S. R. (2009). *Bimbingan teknis PKH*. Indonesia, R. (n.d.). *UUD 1945*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT remaja rosdakarya, 102-107
- Nafi, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ( 2016-2019 ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 953–960.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pujileksono, S. (2018). *Dasar-dasar Praktik Pekerjaan Sosial: Seni Menjalani Profesi Pertolongan*. Intrans Publishing.
- Siti Abidah Lubis. (2019). *Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*.
- Steer, AD. (2011). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Ikhtisar, Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Kawasan Asia Timur dan Pasifik*. Jakarta : Gradasi Aksara.
- Supriyanto. (2006). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3, 3.
- Rahmawati, Evi. 2017. *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 1 (2).
- Zastrow, C. (2007). *The Practice of Social Work: A Comprehensive Worktext*. 8th Edition. USA: Thomson Brooks/Cole Publishing Company)

#### Wawancara

- Erna, B. (2022). *Wawancara*. Sebagai Pekerja Sosial Ibu Kelurahan. (2022). *Wawancara*. Sebagai Penerima Manfaat
- Murtini, I. (2022). *Wawancara*. Sebagai Penerima Manfaat